

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Subsektor perkebunan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia dan merupakan penyedia bahan baku untuk sektor industri, penyerap tenaga kerja dan penghasil devisa (Direktorat Jendral Perkebunan, 2020). Salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan adalah kopi. Kopi (*Coffea sp*) merupakan produk yang mempunyai peluang pasar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Indonesia termasuk produsen kopi terbanyak di dunia. Kesempatan untuk mengembangkan kopi sebagai penggerak perekonomian daerah sebenarnya sangat besar, khususnya bagi daerah-daerah sentra produksi kopi.

Komoditas kopi memiliki peran cukup penting dalam perekonomian nasional, baik sebagai sumber pendapatan bagi petani kopi, sumber devisa, penghasil bahan baku industri, maupun penyedia lapangan kerja melalui kegiatan pengolahan, pemasaran, dan perdagangan (ekspor dan impor). Negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan kondisi iklim yang sangat mendukung bagi pengembangan budidaya tanaman. Salah satunya yaitu tanaman Kopi (*Coffea sp*) yang mempunyai potensi baik untuk peningkatan sumber devisa negara.

Penduduk Indonesia yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2020 sebanyak 5.919.782 dengan jumlah penduduk 128.454.184 jiwa, dan sisanya bekerja di bidang lain (Badan Pusat Statistik (BPS), 2020). Proses keberhasilan kegiatan produksi pada usahatani petani mayoritas memiliki permasalahan mengenai kurangnya informasi harga, modal, teknologi, aspek sosial dan politik

yang berkaitan dengan kebijakan bagi petani. Oleh sebab itu, perlu adanya kegiatan penyuluhan pertanian untuk mengatasi permasalahan tersebut serta mendorong petani untuk dapat mengembangkan usahanya dalam berbagai kegiatan terkait dengan bidang pertanian (Halimah & Subari, 2020).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memandirikan masyarakat sesuai dengan kemampuannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat dapat digunakan untuk mengakses sumberdaya lokal sebaikmungkin. Proses pemberdayaan tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan (people or community centered development). Pemberdayaan masyarakat muncul pertama kali pada saat aktivis gerakan *black panther* memobilisasi politik di USA pada tahun 1960 dan pada pertengahan tahun 80-an kaum wanita mempopulerkan kembali konsep pemberdayaan. Kini konsep pemberdayaan telah masuk pada berbagai disiplin ilmu baik pada tataran teori maupun praktek dan telah menjadi kataplastisyang digunakan dalam berbagai konteks, sehingga kehilangan makna yang sebenarnya.

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari kata "empowerment".Istilah pemberdayaan di Indonesia mulai populer pada tahun 1998 dan terus berkembang pada era reformasi. Pemberdayaan masyarakat di Indonesia umumnya ditujukan kepada masyarakat desa yang minim akan potensi sumber daya manusia namun kaya akan potensi sumber daya alam. Pemberdayaan masyarakat desa tersebut dimulai pada era orde baru dengan segenap program pembangunan yang dirumuskan melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Implementasi dari Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada zaman orde baru dijabarkan melalui pembangunan infrastruktur pedesaan, yaitu menunjang pembangunan desa tertinggal dengan

memanfaatkan sumber daya pertanian sebagai basis pemenuhan pangan nasional. Untuk menunjang hal tersebut pemerintah di zaman orde baru membuat barikade pertahanan pemberdayaan masyarakat desa dengan membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan desa, seperti: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, dan lain-lain.

Pada prinsipnya pemberdayaan mengisyaratkan bahwa, masyarakat perlu menganalisis tantangan utama pembangunan dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat berhubungan erat dengan pelaksanaan keberlanjutan pembangunan masyarakat, karena pemberdayaan merupakan prasyarat utama untuk memobilisasi masyarakat menuju suatu keberlanjutan pembangunan masyarakat yang sejahtera, baik secara ekonomi, sosial, teknologi, budaya, dan ekologi yang dinamis.

Pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dari individu atau kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan pada kehidupan sosialnya. Banyak individu yang memiliki pemikiran untuk memperbaiki kondisi masyarakatnya, tetapi mereka banyak yang tidak mengetahui bagaimana untuk mengimplementasikannya. Pemberdayaan implementasi merupakan proses pengembangan potensi dan kemampuan masyarakat, sehingga akan tumbuh kapasitas mereka untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi. Usaha untuk memperbaiki keadaan masyarakat harusnya dimulai dari individu atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menjalankan pekerjaan dengan baik. Selanjutnya hasil kerja dari sekelompok orang ini dapat dikembangkan, sehingga akan mempengaruhi pekerjaan lainnya dan akhirnya akan mengubah keadaan seluruh masyarakat.

Sejalan dengan konsep pemberdayaan masyarakat, kebijakan pembangunan penyuluhan pertanian meletakkan pelaku utama (petani) dan pelaku usaha sebagai bagian dari masyarakat yang ikut menentukan arah pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat yang berupaya untuk memberikan kekuatan kepada petani dalam mengelola usaha tani sesuai dengan kemampuannya.

Penyuluh pertanian sebagai agen perubahan yang dapat memberikan informasi dan pembelajaran kepada petani sesuai dengan permasalahan sosial yang dihadapi petani melalui media dan metode pembelajaran yang sesuai dengan perilaku petani. Kebijakan pembangunan penyuluhan pertanian merupakan aras utama dalam penajaman arah baru pembangunan nasional, seiring dengan agenda reformasi pembangunan pertanian, yaitu pembangunan yang demokratis untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Penyuluhan pertanian diartikan sebagai proses pembelajaran bagi petani dan keluarganya serta pelaku usaha pertanian lainnya agar mereka tahu, mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses pasar, teknologi pertanian, dan permodalan untuk meningkatkan produksi usahatani, efisiensi, dan efektifitas usaha serta pendapatan keluarganya.

Penyuluhan pertanian dalam makna pemberdayaan masyarakat mengisyaratkan bahwa petani adalah masyarakat yang mampu mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan potensi sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Dengan potensi tersebut petani diharapkan mampu mengubah pola berpikirnya kearah yang lebih baik. Hal ini berarti penyuluhan pertanian dapat dikatakan sebagai bentuk pendidikan kepada petani dan keluarganya. Prinsip pendidikan kepada petani dilakukan melalui pendidikan orang dewasa yang mengedepankan humanisasi, demokrasi, dan pemberdayaan. Prinsip pendidikan

orang dewasa ini mengisyaratkan bahwa penyuluhan dan petani merupakan unsur pertama dan terakhir dalam melaksanakan pembangunan pertanian (*extension first and extension last, farmers first and farmers last*).

Penyuluhan pertanian adalah pendidikan non-formal untuk petani dengan untuk mendapatkan keahlian, pengetahuan serta keterampilan melalui suatu proses belajar yang diinisiasi oleh penyuluh. Seorang penyuluh mempengaruhi sasaran melalui perannya sebagai motivator, fasilitator, komunikator, serta inovator petani (Marbun, *et al.*, 2019).

Pada proses kegiatan penyuluhan perlu adanya peran kelompok tani karena kelompok tani menjadi salah satu dari komponen sistem agribisnis. Meskipun penyuluh berupaya dengan petani atau kelompok tani untuk menjalankan pembangunan pada sektor pertanian akan tetapi masih diperlukan kebijakan pemerintah yang berpihak pada penyuluh. Kegiatan-kegiatan penyuluhan diharapkan bisa meningkatkan perkembangan kelompok tani dari segi kualitas dan kuantitas, memiliki hubungan baik terhadap instansi yang terkait, dan produksi meningkat yang mengakibatkan peningkatan ekonomi untuk petani. Wujud dari suatu kegiatan penyuluhan untuk pengembangan kelompok tani bisa dilihat dari adanya pertemuan-pertemuan anggota kelompok yang dilakukan secara rutin serta kegiatan gotong royong yang didampingi penyuluh.

Kerjasama antara penyuluh dengan kelompok tani sangat diperlukan untuk menghasilkan petani yang baik dan berkualitas. Oleh karena itu, penyuluh berperan sebagai motivator, komunikator, fasilitator dan inovator, yaitu melakukan pembinaan kelompok tani sehingga nantinya kelompok tersebut akan mampu untuk tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang memadai dan selanjutnya akan mampu menopang kesejahteraan anggotanya (Najib & Rahwita, 2010).

Berkurangnya tenaga penyuluh saat ini menyebabkan terjadi kesenjangan dalam mendampingi petani di perdesaan (Haryanto *et al.*, 2018). Berkurangnya tenaga penyuluh pemerintah di lapangan menyebabkan kesenjangan inovasi petani terhadap perubahan informasi yang cepat dan menurunnya efektivitas kegiatan penyuluhan. Akibatnya petani tidak berdaya dalam menghadapi perubahan di lingkungannya sendiri terutama berkenaan dengan usaha tani, sehingga peran penyuluh masih dibutuhkan kehadirannya oleh petani untuk mengatasi hal tersebut.

Kurun waktu 2001 sampai 2016 terjadi penurunan jumlah penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 25%, akibat pensiun, alih fungsi jabatan dan berkurangnya pengangkatan tenaga penyuluh oleh pemerintah. Pusluhan-Kementan (2017) mencatat terdapat 25.332 orang penyuluh PNS, 6.069 orang CPNS Penyuluh dan 13.018 orang Penyuluh kontrak Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP). Jumlah desa dan kelurahan yang memerlukan pendampingan penyuluh untuk petani adalah 74.093 desa dan 8.412 kelurahan (Kementerian Dalam Negeri, 2015), sehingga amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang menyatakan bahwa penyediaan penyuluh sedikitnya satu penyuluh untuk setiap desa sulit untuk terpenuhi

Beberapa penelitian seperti (Rangkuti *et al.*, 2018) menyatakan peran penyuluh pertanian cukup baik dalam mengembangkan kelompok tani tanaman kopi di Desa Jongkok Raya. Peran penyuluh pertanian sebagai komunikator dan fasilitator secara parsial berpengaruh terhadap pengembangan kelompok tani adalah hasil penelitian dari (Marbun, *et al.*, 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memilih “Peran Penyuluh Pertanian Lapang Dalam Pemberdayaan Petani Kopi (Studi Kasus Kelompok

Tani Kopi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)”. sebagai judul penelitian karena memandang perlu dilakukannya penelitian tersebut sehingga diperoleh informasi yang lebih jelas disertai bukti ilmiah tentang peran penyuluh dalam pemberdayaan petani.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi peran penyuluh pertanian dan pemberdayaan petani kopi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?
2. Apakah peran penyuluh pertanian berpengaruh terhadap pemberdayaan petani kopi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan peran penyuluh pertanian dan pemberdayaan petani kopi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk menganalisis pengaruh peran penyuluh pertanian terhadap pemberdayaan petani kopi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan tentang seberapa besar pengaruh peranan penyuluh pertanian terhadap pengembangan kelompok tani

sebagaimana sesuai dengan teori yang telah diberikan dengan penerapan secara praktek dan untuk mengasah kemampuan diri dalam berfikir.

1.4.2 Manfaat Secara Praktis

Bagi pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait sebagai bahan masukan dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi pertanian disuatu daerah terutama untuk meningkatkan pemberdayaan serta pengembangan kelompok tani melalui peran penyuluh pertanian secara menyeluruh khususnya di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.